

# DAMAI BERBASIS ADAT DI HILA SALAM-SARANE DAN KAITETU

**Benico Ritiauw**

## **Abstrak**

Negeri Hila Salam-Sarane dan Kaitetu (Islam-Kristen) merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Ambon Maluku yang memiliki keunikan dalam mengkonstruksi tipologi sosialnya. Keunikan tersebut tercermin melalui pola tundakan integratif yang menegasikan tendensi keagamaan dalam setiap proses sosial. Betapa tidak, kesatuan ideologi dalam kerangka Hidup Orang Basudara (Hidup Bersaudara) menjadi aktor utama dalam tercapai sifat integratif yang tentunya menjadikan nilai-nilai adat sebagai basisnya. Lembaran sejarah yang tidak bisa diluoakan ketika masyarakat Hila Sarane (Kristen) terafiliasi ke dalam sistem adat Hila Salam (Islam) sehingga memicu adanya tanggungjawab sosial-kultural sekaligus menjadi modal dalam pembentukan collective consciousness berbasis nilai adat guna mendefinisikan dan mengkonstruksi damai yang ideal. Fakta kehidupan yang digambarkan itu pernah mengalami guncangan yang luar biasa ketika pecahnya konflik berdarah antara dua kelompok besar yaitu Islam dan Kristen di kota Ambon dan sekitarnya pada tahun 1999. Kota Ambon menjadi begitu mencekam ketika sesama masyarakat Ambon diperhadapkan untuk saling membunuh dan menghancurkan satu sama lain. Namun, fakta ini dengan mudahnya dipatahkan oleh masyarakat negeri Hila Salam-Sarane dan Kaitetu yang sama sekali tidak saling membunuh tetapi justru saling menyelamatkan. Wawasan damai yang menyejarah dalam pertalian hubungan adat, ditirunkan dan dimanfaatkan guna membangun sebuah tidakan yang integratif. Pola hidup yang damai tetap dijalankan oleh masyarakat Hila Slam-Sarane dan Kaitetu sekalipun tubuh kehidupan sosialnya harus terdampak oleh konflik sehingga mengakibatkan adanya segregasi teritorial hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi

damai berbasis nilai adat di masyarakat Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Hasil penelitian menemukan bahwa penafsiran akan makna dari sistem adat telah membangun sebuah kerangka kehidupan lintas agama yang kokoh dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang terkadang kontra eksistensi.

**Kata Kunci:** Damai, Integrasi, Nilai Adat

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Tahun 1999, kurang lebih 19 tahun yang lalu, orang Maluku diguncang oleh bencana kemanusiaan yaitu kerusuhan. Orang yang tadinya hidup berdampingan harus termakan dengan berbagai kiat-kiat untuk berkonflik. Bendera agama dikibarkan sehingga memicu semangat untuk beresistensi dari masing-masing kelompok agama.

Jika dilihat dari rentetannya, konflik Ambon setidaknya diawali dengan peristiwa sepele, dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, yaitu konflik antar preman Batumerah (Muslim) dan Mardika (Kristen) pada tanggal 19 Januari 1999, dalam sekejap menimbulkan pertikaian antar kelompok agama dan suku bangsa, dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon. Kerusuhan itu bahkan meluas ke seluruh Pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan.

Kerusuhan yang berlarut-larut di Pulau Ambon yang semula berpenduduk 312.000 jiwa ini memakan banyak korban jiwa. Korban pengungsi mencapai sekitar 100.000 jiwa yang lari ke luar Ambon dan menyisakan 20.000 jiwa orang yang terpaksa tinggal di 34 lokasi pengungsian. Kota dan desa-desa di Ambon bertebaran dengan puing-puing bangunan rumah ibadat, rumah tinggal dan toko yang dibakar serta diratakan dengan tanah. Kota Ambon dan sebagian desa-desa sekitarnya tersegregasi ketat dan terbagi dalam dua wilayah yaitu Islam dan Kristen. Masyarakat dan wilayah Kristen disebut merah, dan yang Muslim disebut putih. Di kota Ambon, masyarakat hidup dalam keadaan terpisah: pasar khusus merah, pasar khusus putih, pelabuhan *speedboat* merah dan putih, becak merah dan putih, angkot merah dan putih, bank merah dan putih,

dan sebagainya.

Berbagai upaya telah diambil untuk mengakhiri konflik, termasuk yang dipimpin oleh petugas keamanan; pemerintahan pusat dan daerah; LSM internasional dan lokal; masyarakat lokal dan kelompok perempuan. Dua pendekatan yang luas terhadap pengelolaan konflik di Maluku muncul dari upaya pendekatan keamanan dan darurat; serta pendekatan pemulihan dan pembangunan.

Pengelolaan konflik sebelum Perjanjian Damai Malino pada Februari 2002 (Malino II) sebagian besar adalah bersifat reaktif. Tidak ada strategi atau perencanaan jangka panjang baik oleh Pemerintah maupun masyarakat sipil. Alat pengelolaan konflik yang utama digunakan adalah pengiriman bantuan dan keamanan, mengandalkan pada militer yang didatangkan dari luar Maluku. Malino II adalah sebuah titik balik yang signifikan ditandai dengan pengalihan ke pendekatan pemulihan dan pembangunan.

Setelah proses perdamaian Malino II, pemerintah pusat dan daerah menggunakan perangkat hukum – menangkap dan menuntut mereka yang memegang senjata dan melakukan serangan – dan fokus kepada perencanaan pembangunan jangka panjang dan pemulihan. Masyarakat sipil juga mengalihkan pendekatannya dari bantuan darurat ke pembangunan dan pemulihan.

Berbagai upaya dalam rangka mencari solusi perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah maupun inisiatif masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut telah memberikan hasil, setelah kurun waktu 4 tahun, yaitu tahun 2003, baru eskalasi kekerasan konflik menurun. Simbol-simbol kerukunan; ikatan adat istiadat dan kerukunan umat beragama yang pada masa awal konflik Maluku seolah-olah hanya simbol belaka, ternyata merupakan kekuatan besar, yang menjadi instrumen yang kuat dalam upaya proses rekonsiliasi masa-masa pasca konflik.

Beberapa narasi tentang indahnya damai, mencuat dengan gemparnya di seantero kehidupan orang Maluku. Dengan berkaca pada kehidupan masa lalu, hubungan-hubungan adat, orang mulai

merindukan untuk bisa kembali hidup dalam situasi damai yang nir prasangka dan kekerasan. Damai tentunya merupakan sebuah situasi sosial tanpa kekerasan dan pertentangan yang sangat dibutuhkan dalam menjaga eksistensi kehidupan masyarakat di tengah arus kompleksitas global yang kian menguat. Situasi yang damai tentunya menjanjikan adanya pembangunan kehidupan manusia yang beradab dan tercermin melalui *social engagement* di tengah kemajemukan yang ada. Namun, situasi yang damai bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk dicapai di dalam dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki rentetan sejarah konflik dan pertentangan. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang pernah mengalami konflik, terwujudnya situasi damai akan sangat bergantung pada proses perdamaian yang secara bersama dilakukan baik yang diaktori oleh *collective consciousness* antar sesama masyarakat maupun adanya pihak ketiga dalam memicu bangkitnya semangat untuk berdamai.

Seperti yang sudah penulis jelaskan bahwa situasi damai bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk dicapai pada masyarakat yang memiliki rentetan sejarah konflik dan pertentangan. Hal ini dikarenakan konflik memicu adanya pemetaan tubuh masyarakat berdasarkan kelompok kepentingan masing-masing baik itu yang berbau SARA, visi dan misi, dan lain sebagainya. Terpecahnya masyarakat akan sangat berdampak pada persepsi subyektif tentang “siapa” yang menjadi musuh bersama (*common enemy*) dan “siapa” yang menjadi teman dalam bingkai kepentingan yang sama (*common interest*). Proses ini juga akan memicu adanya konflik eksternal di mana integrasi antar anggota kelompok semakin diperkuat oleh kesamaan kepentingan guna melawan kelompok lain yang dianggap membahayakan eksistensi kepentingan tersebut (Coser, dalam Ritzer; 2008). Fenomena ini tentunya akan semakin mempertegas sekat di antara kelompok yang berkonflik dan tetap melanggengkan situasi konflik secara *laten* maupun *manifest*.

Pertanyaan yang kemudian menjadi bahan diskusi bersama adalah “bagaimana ketika konflik tersebut melanda kehidupan masyarakat yang memiliki sejarah ikatan adat kekeluargaan” ? “apakah sistem adat yang dipegang bersama turut dikorbankan

berdasarkan pemetaan kepentingan tersebut” ? Secara kontekstual, penulis lebih menitikberatkan fokus perhatian pada realitas hidup masyarakat Hila Salam-Sarane dan Kaitetu di Ambon Maluku. Hila Salam-Sarane dan Kaitetu (pra konflik) merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh kesamaan adat, tradisi, dan teritorial sehingga membentuk perilaku masyarakatnya yang cenderung integratif. Pemaknaan akan adat bukan hanya menjadi gagasan konseptual semata melainkan terkontekstualisasikan dalam setiap proses sosial yang secara bersama dijalani oleh masyarakat. Falsafah *Hidup Orang Basudara* (hidup bersaudara) menjelma dalam ranah praksis ketika pemaknaan tentang saudara yang sejati, melampaui sekat-sekat pembatas Gereja dan Mesjid.

Dalam tendensi keagamaan, Hila Sarane merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan semantara Hila Salam dan Kaitetu merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meski harus diakui bahwa perbedaan sistem kepercayaan cukup menunjukkan wajah disparitasnya, tetapi fakta hidup kedua kelompok masyarakat ini mengindikasikan adanya integrasi sebagai ekspresi dari makna keadatis-annya yang tertanam kuat dalam diri setiap anggota kelompok masyarakat tersebut.

Namun konstruksi kehidupan yang damai masyarakat Hila Salam-Sarane dan Kaitetu harus terhempas akibat terjangan badai konflik yang bernuansa agama. Harus diakui bahwa mereka (masyarakat Hila Salam-Sarane dan Kaitetu) bukan para pegiat konflik yang mengingini agar konflik itu terjadi. Mereka hanyalah kelompok masyarakat yang terdampak akibat konflik yang bernuansa SARA tersebut. Akibat dari dinamika konflik ini adalah adanya proses segregasi teritorial oleh masyarakat Hila Sarane yang lebih memilih keluar dan menetap di wilayah yang baru dan terafiliasi dengan kelompok masyarakat yang sama dalam sistem keagamaan.

## **2. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah mengetahui serta mengkaji damai berbasis adat di Negeri

Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Sekalipun kembali mempertegas argumentasi relasional dan kausal antara konflik dan damai, tetapi motif argumentasi dalam pembahasan ini ingin menunjukkan fenomena damai yang terselip dibalik kerasnya dimensi konflik.

### 3. Kajian Teori

Pandangan Coser tidak lepas dari tidak lepas dari kritiknya atas sosiologi Amerika waktu itu yang mulai melupakan pembicaraan konflik. Para sosiolog Amerika yang ramai-ramai mengembangkan fungsionalisme telah menggeser tradisi berpikir sosiologi sebelumnya yang berbentuk sosiologi murni menuju corak sosiologi terapan (*applied sociology*). Dalam bukunya "*The Functions of Social Conflict*" Coser mengkritik gagasan-gagasan Parson yang lebih mengupas mengenai keseimbangan dan konsensus dibanding membahas mengenai konflik secara mendalam.

Coser memulainya dengan mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. Tetapi ini berarti bahwa perhatian terhadap pernyataannya dan implikasinya merupakan suatu permasalahan yang lain, sebab dengan pernyataan itu menunjukkan bahwa Coser telah menggunakan istilah yang problematis dan samar-samar, tidak kritis serta menggunakannya dalam asumsi-asumsi fungsionalisme. Perhatian Coser berkaitan dengan fungsi dan disfungsinya konflik sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa konsekuensi konflik bukan mengarah pada kemerosotan melainkan peningkatan, adaptasi dan penyesuaian baik dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan.

Coser berpendapat bahwa konflik tidak selamanya harus dimaknai sebagai hal negatif. Simmel menyatakan bahwa pernyataan permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh bisa memelihara hubungan yang berada di bawah kondisi stres, kemudian

mencegah kebuntuan kelompok lewat menarik diri sebagai pelaku yang terlibat permusuhan. Simmel menghilangkan akumulasi permusuhan yang berhenti dengan pernyataan perilaku secara bebas. Simmel tidak memberikan perhatian penting pada tindakan konflik dengan rasa bermusuhan. Sedangkan menurut Coser, keduanya tidak sama. Konflik benar-benar mengubah waktu hubungan dari perilaku sedangkan perasaan bermusuhan tidak memiliki peran penting dan meninggalkan pengertian ketidakberubahan hubungan.

Konflik tidak selalu mengarah pada permusuhan, tetapi bisa digeser pada pemuasan kebutuhan yang ditunjukkan oleh penemuan objek pengganti tersebut. Dalam kasus politik Indonesia, penganugerahan jabatan politik ditujukan sebagai pencapaian objek pengganti. Objek pengganti menjadi semacam peredam konflik yang lebih besar. Objek pengganti juga akan menjadi bentuk oposisi yang tidak menyebabkan rusaknya hubungan. Sebab dia bisa mengganti pencapaian tujuan yang ditempuh lewat konflik itu. Teori konflik Coser oleh Poloma (2000) menyatakan bahwa *safety value* atau *katup penyelamat* merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan. Safety value mampu mengakomodasi luapan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur.

Coser menyatakan bahwa perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial yang erat. Hubungan yang dekat dikarakteristikan oleh interaksi yang berulang-ulang dan melibatkan kepribadian total dari anggota dan struktur motivasi. Misalnya, konflik yang cukup hebat dalam keluarga besar bangunan hubungan sosial yang dikembangkan bersifat keseluruhan dengan melibatkan emosi dan hubungan-hubungan yang akrab. ketika konflik terjadi, seluruh energi pun dilibatkan.

Mengutip Mac Iver (dalam Susan; 2010), coser menyatakan bahwa ada dua bentuk konflik yaitu:

1. konflik non-komunal, ketika sebuah kelompok atau komunitas meletakkan kesatuan diatas perbedaan-perbedaan.

2. konflik komunal, didasarkan pada penerimaan umum terhadap hasil-hasil dasar, konflik ini berwatak integratif, konflik komunal muncul ketika individu meletakkan perbedaan mereka diatas kesatuan

3. Konflik dengan Kelompok lain meningkatkan kohesi internal

Ikatan-ikatan dalam sebuah kelompok ditegakkan lewat konflik dengan kelompok lain, sehingga kelompok mendefinisikan dirinya sebagai perjuangan dengan kelompok lain. Simmel kemudian meneruskan bahwa konflik dengan kelompok luar akan memperkuat kohesi internal kelompok dan meningkatkan sentralisasi. Konflik membuat anggota kelompok lebih sadar tentang ikatan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka. Konflik dengan kelompok luar memiliki pengaruh yang juga menggerakkan pertahanan kelompok yang menegaskan sistem nilai mereka atas musuh luar.

Simmel menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang memuat sebuah elemen pembatasan sejauh perjuangan hanya menjadi alat mencapai hasil. Jika hasil yang diinginkan dapat dicapai sama baiknya dengan alat lain, maka dalam beberapa contoh, konflik hanyalah satu dari beberapa pilihan fungsional. Tetapi ada beberapa kasus dimana konflik muncul sendiri dari pengaruh agresif yang terjadi karena ada pernyataan yang tidak ada konsekuensi pentingnya terhadap suatu objek. Dari pandangan tersebut, Coser membagi konflik sebagai berikut:

a. Konflik realistik

Konflik realistik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:

- Konflik muncul dari frustrasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada objek frustrasi. Di samping itu, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu.
- Konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Langkah-langkah untuk mencapai hasil ini jelas disetujui oleh kebudayaan mereka. Dengan kata lain, konflik realistik sebenarnya mengejar: *power*, status yang langka,



*resources* (sumber daya), dan nilai-nilai.

- Konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir.
- Konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan.

b. Konflik non-realistik

Sekalipun melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan, namun ada keinginan untuk membebaskan ketegangan setidaknya pada salah satu dari mereka. Dibandingkan dengan konflik realistik, konflik non realistik kurang stabil. Pilihan-pilihan fungsional bukan sebagai alat tetapi objek itu sendiri. Kepentingan yang berbeda bersatu dengan keinginan untuk melakukan aksi permusuhan yang sebenarnya merupakan konflik realistik. Namun tidak sedikit elemen non realistik bercampur dengan perjuangan yang dilakukan bersama-sama atau mendorong adanya peran tertentu.

#### 4. Metode Penelitian

a. Jenis Metode

Dalam proses penelitian ini, penulis akan mempergunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini ;

- Data Sekunder, adalah dilakukan untuk mencari data dan informasi, serta referensi yang berkaitan dengan dukungan yang berkaitan dengan tema penelitian, baik yang terdapat di perpustakaan, maupun yang terdapat dilokasi peneliti dan melalui web di Internet.

- Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti (informan) yaitu masyarakat, Bapak Raja, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

- Wawancara

Proses pengumpulan data di lakukan Dengan Menggunakan Teknik Wawancara mendalam untuk memperoleh data melalui studi Kualitatif. Alat bantu yang di gunakan adalah pedoman wawancara, alat perekam suara, dan dokumentasi melalui foto.

- Observasi (Pengamatan)

Proses pengumpulan data dengan menggunakan pedoman observasi, artinya pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, serta aktivitas masyarakat terkait dengan masalah penelitian. Dalam proses ini posisi peneliti sebagai subyek dan realitas di lapangan sebagai objek yang diobservasi.

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data dan informasi, serta referensi yang berkaitan guna menganalisis dan mengkaji lebih jauh permasalahan yang akan diteliti baik yang terdapat pada buku, jurnal, dan lain sebagainya.

### C. Pembahasan

Ketika kata “Ambon” pertama kali diucapkan dari seorang Ambon kepada orang lain, maka realitas imajiner yang terpancar dari si orang asing tersebut adalah konflik, kekerasan, dan lain sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Ambon dan sekitarnya pernah mengalami musiba kemanusiaan di mana sesamanya (orang Ambon) harus mengangkat parang dan tombak yang penuh dengan darah bangsanya sendiri. 18 tahun silam, tepatnya di tahun 1999, sesama *orang basudara* (orang bersaudara) “dipaksa” untuk saling

menjaga anggota kelompoknya masing-masing (Islam dan Kristen) dan membantai anggota kelompok yang lain dalam atmosfer keagamaan.

Coser (dalam Poloma; 2000) bahwa perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial yang erat. Hubungan yang dekat dikarakteristikan oleh interaksi yang berulang-ulang dan melibatkan kepribadian total dari anggota dan struktur motivasi. Misalnya, konflik yang cukup hebat dalam keluarga besar bangunan hubungan sosial yang dikembangkan bersifat keseluruhan dengan melibatkan emosi dan hubungan-hubungan yang akrab. ketika konflik terjadi, seluruh energi pun dilibatkan.

Konflik 1999 tidak hanya menunjukkan wajah ekstrimnya ketika konflik sementara berlangsung, melainkan pasca konflik itu sendiri. Proses segregasi besar-besaran pun terjadi sebagai dampak dari konflik, dan terlihat ketika ada semacam pembagian wilayah penguasaan seperti Batu Gantung, Kudamati, Benteng, Passo, dan lain sebagainya yang merupakan wilayah yang didominasi oleh pihak Kristen sementara Batu Merah, Galunggung, Kebun Cengke, Waihaong, dan lain sebagainya merupakan wilayah yang didominasi oleh pihak Islam. *Steriotype* dan *prajudice* merupakan sebuah fenomena paten yang selalu ditemui dalam keseharian kehidupan masyarakat yang telah terlanjur tersegregasi. Dinamika ini menunjukkan bahwa dampak konflik 1999 bukan hanya berlaku pada segregasi secara teritorial tetapi lebih dari pada itu telah terjadi sebuah bentuk segregasi pola pikir dalam mempersepsikan setiap kenyataan sosial yang dijalani.

Pembentukan pola segregasi tersebut tentunya akan sangat mengindikasikan adanya pemeliharaan konflik yang cenderung bersifat *laten* dan bisa saja berubah menjadi *manifest* ketika muncul persoalan konflik yang sama. Jika demikian, lantas bagaimana dengan sistem nilai adat yang sudah menjadi pedoman hidup masyarakat Ambon sejak dulu ? atukah bagaimana konstruksi damai dalam tendensi kehidupan orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu ?

Konflik 1999 tidak menjadi tembok yang memenjarakan semangat adatis yang dimiliki orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Di saat semua orang sibuk untuk mengangkat parang dan berperang, orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu justru sibuk untuk saling menyelematkan satu sama lain. Dalam konteks ini, ada siratan kritikan yang tertuang dalam konteks hidup orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu yaitu Damai bukanlah anak tunggal dari konflik. Damai bukanlah sesuatu yang muncul pasca konflik, atau retaknya hubungan menjadi wadah untuk berdamai. Dijelaskan demikian karena disadari sungguh bahwa Damai sudah menjadi warisan, tabiat, dan sekaligus fondasi hidup orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu.

Sistem adat dalam kehidupan orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu, sudah terlanjur mendarah daging dalam setiap sendi kehidupan. Dalam tatananya, ada beberapa nilai-nilai adat yang teraplikasi kedalam dunia praksis orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Tradisi *Pa'aloli* merupakan tradisi gotong-royong yang dinubuatkan oleh orang Hila Salam-Sarane. Dalam tradisi ini, setiap warga yang sementara berhajatan atau bahkan berduka, akan mendapatkan bantuan sukarela dari warga baik itu berupa uang, tenaga, dan waktu. Dalam sistemnya, tidak ada pengklasifikasian berdasarkan agama.

Dengan demikian maka setiap orang bebas mengekspresikan kebebasan adatis guna memperdalam hubungan kekeluargaan dengan semua orang. Orang Hila Sarane (Kristen) juga terafiliasi ke dalam sistem adat Hila Salam (Islam) di mana ada kepercayaan yang dibangun berdasarkan sejarah kepada orang Hila Sarane (Kristen) untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam sistem adat dan menjadi anak adat murni. Orang Hila Sarane, juga dianggap sebagai bagian dari perkumpulan orang Kaitetu (Islam) di mana orang Hila Sarane (Kristen) memiliki bagian tersendiri yang terlegitimasi dalam sistem adat orang Kaitetu untuk menggantikan atap Mesjid. Bukan tanpa dasar yang jelas, falsafah *Hidop Orang Basudara* (orang bersaudara) dan nilai-nilai *Pela-Gandong* menjadi pendobrak semangat hidup orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis.

Secara umum, konflik 1999 berdampak pada tindakan saling membantai antar umat beragama yang sama sekali menegasikan falsafah *hidop orang basudara* (hidup bersaudara), tetapi menariknya adalah ada sebagian daerah di Ambon dan sekitarnya yang tidak termakan dengan isu dan tendensi agama tersebut dan salah satunya adalah Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Konflik Ambon 1999 selain membangkitkan *spirit* perjuangan berbasis agama juga memicu bangkitnya semangat juang berbais adat untuk bisa membela, melindungi, dan menyelamatkan kelompok masyarakat lain yang dipersepsikan sebagai “saudara” (Islam dan Kristen).

Secara teritorial, sangat tidak memungkinkan bagi orang Hila Sarane (Kristen) untuk selamat dalam tragedi kerusuhan 1999 tersebut karena daerah Hila Sarane (Kristen) diapit oleh begitu banyak daerah Islam seperti Mamala, Morela, Hitu, Wakal, Hila Salam (dari sisi timur) dan Kaitetu, Ureng, Seith, Negeri Lima, Asilulu (dari sisi barat). Namun pertanyaannya adalah kenapa orang Hila Sarane bisa selamat dari tragedi tersebut? Penulis menemukan bahwa tragedi kemanusiaan pada tahun 1999 tidak hanya memicu tingginya *spirit* keagamaan, tetapi juga memicu adanya *spirit* kultural berbasis falsafah *hidop orang basudara* yang terimplementasi lewat tindakan penyelamatan dari orang Hila Salam dan Kaitetu (Islam) terhadap Hila Sarane (Kristen). Jika mengutip pada penjelasan Coser (dalam Poloma; 2000) realitas ini menunjukkan adanya konflik eksternal di mana muncul perlawanan berbasis adat guna menyelamatkan saudara warisan adatis yang tercermin melalui falsafah *hidop orang basudara* sekalipun harus mengorbankan tendensi keagamaan. Nilai-nilai adat yang tercermin melalui falsafah “Hidop Orang Basudara” ini memiliki kekuatan tetap dalam mengontrol setiap perilaku baik individual maupun kolektif. Falsafah “Hidop Orang Basudara” dapat termanifestasi dalam setiap tindakan yang cenderung pro eksistensi dan bersifat integratif tanpa memandang perbedaan (Watloly; 2005).

Pada masa pasca konflik, orang Hila Sarane yang tersegregasi secara teritorial tidak mengalami distorsi pemikiran dalam menafsirkan orang Hila Salam dan Kaitetu. Ketika sebagian besar orang Ambon mengalami transformasi pemikiran yang tereduksi

ke dalam tendensi keagamaan, orang Hila Sarane tetap pada basis pendirian yang mengklaim orang Hila Salam dan Kaitetu sebagai saudara sejati. Persepsi tersebut seakan sudah melembaga dan paripurna dalam diri orang Hila Sarane sebagai bagian dari” proses internalisasi akan kenyataan yang dibenarkan secara subyektif” (Berger; 2013). Indahnya kehidupan bersama yang sudah berlangsung secara turun-temurun menjadi sayu kenyataan hidup orang Hila Salam-Sarane yang terinternalisasi ke dalam batin setiap individu dan berwujud pada tindakan yang integratif.

Sekalipun memang terpisah secara teritorial, hingga kini, orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu masih tetap menjalin hubungan persaudaraan. Adanya media pertemuan sosial (sosial, ekonomi, pendidikan) dapat dipandangan sebagi *social glue* yang semakin merekatkan hubungan persaudaraan. Dalam konteks ini, penulis dengan tegas menolak sebagian besar persepsi masyarakat yang menganggap segregasi sebagai petaka perdamaian. Dalam masyarakat yang telah mengalami pergeseran nilai budaya mungkin argumentasi tersebut dapat dibenarkan, tetapi pada konteks masyarakat yang masih menjaga kesakralan dari nilai-nilai adat maka segregasi bukan menjadi sebuah alasan untuk tetap memelihara konflik secara laten.

Segregasi dalam tendensi hidup orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu bukanlah sebuah petanda akan trauma untuk hidup berdampingan melainkan lebih kepada sebuah pilihan yang dipertimbangkan berdasarkan aspek ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kehidupan di relokasi membukakan gerbang dalam mengakses berbagai sumber-sumber kehidupan yang sebelumnya cukup sulit untuk didapatkan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan beberapa rincian singkat yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan guna memaknai realitas perdamaian orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu yaitu sebagai berikut:

1. Nilai-nilai adat mampu menjadi *panacea* dalam menetralsisir

virus keagamaan dalam kehidupan orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Tidak dapat dihindari bahwa Agama tidak bermakna tunggal, tidak bebas nilai, dan tidak hanya sebagai pemersatu. Dapat dilihat bahwa hadirnya agama di dalam dunia semakin mempertegas perbedaan identitas antar masing-masing kelompok. Sekalipun ada persamaan dalam menafsirkan tentang makna kehidupan sosial, agama memiliki ruang tafsir yang juga eksklusif sehingga semakin menegaskan batas-batas antara satu dan yang lainnya. Dalam konteks hidup orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu, berbagai keterbatasan itu menuai penyempurnaan dalam sistem adat. Konflik bernuansa agama tidak serta merta menghancurkan tatanan kehidupan orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu. Bias-bias negatif dari sistem kolektifitas agama sepenuhnya disembuhkan dengan berbagai stimulan nilai-nilai adat yang dipegang oleh masyarakat setempat.

2. Adanya disparitas dalam pemaknaan konsep Islam-Kristen (teologis) dan Salam-Sarane (kultural) guna menciptakan perdamaian berbasis adat. Salam sarane merupakan penyebutan orang Maluku untuk membedakan kelompok Islam (Salam) dan Sarane (Kristen). Meskipun terlihat sama, kedua konsep ini berbeda secara praktis dan konseptual satu sama lain. Islam-Kristen bergerak dalam tendensi teologis dan mengandung nilai-nilai universal. Berbeda dengan itu, Salam-Sarane bergerak dalam tendensi kultural dan mengandung nilai-nilai adat sehingga cenderung menjadi basis interpretasi orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu dalam memandang dunia sosialnya.
3. Penafsiran makna kehidupan berbasis adat mampu mengkonstruksikan kehidupan masyarakat yang integratif. Praktek nilai adat dalam kehidupan orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu tidak hanya menjadi sebuah gagasan seremonial belaka namun telah mewataki setiap tindakan orang Hila Salam-Sarane dan Kaitetu yang integratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter.L dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Soisologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Watloly, Aholiab, 2005, *Maluku Baru: Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*, Kanisius, Yogyakarta.
- Susan, Nofri. 2010. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pruit, G. Dean dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.